

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zaman sekarang ini banyak sekali perusahaan yang bermunculan. Pada dasarnya seseorang mendirikan perusahaan agar mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Akan tetapi pada saat ini yang dipentingkan oleh perusahaan adalah bagaimana caranya agar perusahaan tersebut memiliki nilai yang baik. Perusahaan yang memiliki nilai yang baik menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai kinerja keuangan yang baik. Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik dapat dilihat dari tata kelola yang ada pada perusahaan (*corporate governance*).

Tata kelola (*corporate governance*) menjadi poin penting atau budaya yang harus diperhatikan keberadaannya oleh perusahaan. *Corporate governance* di dalam perusahaan seringkali diabaikan penerapannya. *Corporate governance* itu sendiri berisi tentang mekanisme dan struktur yang ada dalam perusahaan yang mengatur pengelolaan perusahaan. Keberadaan *corporate governance* dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan yang memiliki *good corporate governance* maka perusahaan tersebut telah memiliki kinerja keuangan dan nilai perusahaan yang baik, sehingga investor akan lebih tertarik untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan yang memiliki *good corporate governance*. Martono (2005:35, dalam Sarafina dan Saifi, 2017) menyatakan bahwa nilai perusahaan dapat dilihat dari nilai saham perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (dalam Reding dkk, 2013:3-3), Tata kelola adalah proses yang dilakukan oleh dewan direksi untuk mengotorisasi, mengarahkan, dan mengawasi manajemen terhadap pencapaian tujuan organisasi. Menurut Reding dkk. (2013:3-3), tata kelola perusahaan melibatkan serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Tata kelola perusahaan juga

meyediakan struktur dimana tujuan perusahaan ditetapkan, dan sarana untuk mencapai tujuan dan pemantauan kinerja ditentukan (Reding dkk, 2013:3-3). Tata kelola sendiri memiliki pihak-pihak utama yang berkepentingan di dalamnya yaitu pemegang saham, manajemen perusahaan, dewan direksi, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemangku kepentingan meliputi karyawan perusahaan, pemasok, pelanggan, kreditur, regulator, bank, lingkungan sekitar, dan masyarakat.

Perusahaan dianggap mempunyai *good corporate governance* apabila perusahaan tersebut mentaati peraturan atau prinsip-prinsip yang berlaku. Prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan mempunyai *good corporate governance* yaitu prinsip akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), keterbukaan (*transparency*), kewajaran (*fairness*), dan kemandirian (*independency*) (Komite Nasional Kebijakan Governance., 2006; dalam Meliliani, 2013). Akuntabilitas (*accountability*) memuat kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan dewan direksi dan juga kewajibannya kepada pemegang saham. Dewan direksi bertanggung jawab terhadap keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya, sedangkan komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan yang dilakukan dan harus memberikan nasehat kepada dewan direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara maksimal. Pertanggungjawaban (*responsibility*) memuat agar pimpinan perusahaan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab.

Keterbukaan (*transparency*) memuat agar informasi seperti laporan keuangan perusahaan yang diungkapkan harus benar apa adanya tanpa ada yang ditutupi. Kewajaran (*fairness*) memuat agar seluruh pemangku kepentingan harus mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Kemandirian (*independency*) memuat agar para anggota perusahaan dapat bertindak secara mandiri sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel mekanisme dalam mengukur *good corporate governance* yaitu komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit. Ketiga mekanisme *good corporate governance* ini diharapkan agar dapat

meningkatkan kinerja perusahaan dan menjadi nilai tambah bagi perusahaan. Komisaris independen bertugas mengawasi aktivitas manajemen agar manajemen bertindak atas kepentingan pemilik saham. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring* agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance* (Suyanti *et al.*, 2010; dalam Julianti, 2015).

Menurut Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 menyatakan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari seluruh anggota komisaris, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki bukan pemegang saham pengendali. Penelitian ini juga melibatkan dewan direksi dimana dewan direksi bertugas untuk menentukan kebijakan strategi yang diambil oleh perusahaan. Keberadaan komite audit sangat diperlukan di dalam perusahaan karena komite audit memiliki tanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan agar dapat meminimalisir adanya kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen. Keberadaan komite audit di suatu perusahaan mengakibatkan pengendalian terhadap laporan keuangan perusahaan semakin baik.

Gendut (2010, dalam Wati, 2012) menyatakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan dapat memberikan banyak manfaat yaitu, perusahaan mendapatkan kepercayaan investor dan publik, perusahaan dapat memperbaiki faktor internal perusahaan yang belum sesuai dengan peraturan terwujudnya GCG, perusahaan dapat meningkatkan kesadaran bersama dikalangan internal perusahaan dan *stakeholder* terhadap pentingnya GCG dalam perusahaan. Intinya *good corporate governance* tidak berbicara tentang kekuasaan, melainkan berbicara tentang upaya pencarian solusi untuk keputusan-keputusan yang dibuat agar efektif. Agar proses pembuatan keputusan perusahaan dapat berlangsung secara efektif, maka dibutuhkan hubungan yang kalaboratif antara pihak manajemen dan dewan komisaris.

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk meneliti tentang hubungan mekanisme *corporate governance* tetapi hasil yang didapatkan belum konsisten. Menurut Santoso (2017) mengatakan bahwa penerapan mekanisme GCG yang diwaliki oleh proxy kepemilikan institusional memiliki berpengaruh terhadap nilai

perusahaan. Menurut Soeryapranata (2018), mengatakan bahwa mekanisme *corporate governance* yang diukur dengan menggunakan proporsi komisaris independen, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan mekanisme *corporate governance* yang diukur dengan menggunakan proporsi komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Sedangkan menurut Nofitasari (2015, dalam Sarafina dan Saifi, 2017) mengatakan bahwa mekanisme *corporate governance* yang diukur dengan menggunakan proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Menurut Wardoyo dan Veronica (2013), mengatakan bahwa mekanisme *corporate governance* yang diukur dengan menggunakan proporsi dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan mekanisme *corporate governance* yang diukur dengan menggunakan proporsi ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris dan jumlah anggota audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Perusahaan tidak hanya melibatkan pihak dari dalam perusahaan saja, tetapi juga melibatkan pihak luar dari perusahaan. Pada penerapan *corporate governance* di dalam perusahaan melibatkan peran antara manajemen dan pemegang saham. Pihak manajemen harus mementingkan kepentingan bersama agar mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Dalam hal ini dapat terjadi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham.

Asimetri informasi dapat terjadi apabila salah satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih baik dari pada pihak lainnya. Biasanya dalam kasus ini manajemen perusahaan lebih mengetahui banyak informasi dibandingkan para pemegang saham. Hal ini dapat menjadikan konflik antara manajemen dengan para pemegang saham. Bahkan manajemen dapat mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan pemegang saham. Sehingga asimetri informasi dapat dikurangi dengan cara penerapan *good corporate governance* pada perusahaan.

Selain mekanisme *good corporate governance*, perusahaan juga harus mempertimbangkan nilai yang ada pada perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi pasar (investor) terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering

dikaitkan dengan harga saham suatu perusahaan, sehingga nilai perusahaan yang baik juga harus diperhatikan keberadaannya oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki harga saham yang tinggi akan berdampak pada tingginya nilai suatu perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga di masa yang akan datang.

Seorang investor akan lebih memilih perusahaan yang mempunyai tata kelola yang baik, kinerja keuangan yang baik, dan juga nilai perusahaan yang baik untuk menanamkan dananya. Meskipun perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang baik mempunyai harga saham yang tinggi, tetapi investor percaya bahwa perusahaan yang mempunyai nilai yang baik akan lebih dapat menguntungkan bagi investor karena prospek perusahaan yang terpercaya. Menurut Husnan dkk. (2012:6), nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan nilai perusahaan mereka karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti perusahaan tersebut juga memaksimalkan tujuan utama yang telah dibuat oleh perusahaan.

Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan harga saham dengan menggunakan rasio yang disebut rasio penilaian. Rasio penilaian mencerminkan informasi seberapa besar masyarakat menghargai perusahaan, sehingga masyarakat tertarik untuk membeli saham dengan harga yang tinggi. Penelitian ini menggunakan *Price to Book Value* (PBV) untuk mengukur nilai pada perusahaan, PBV menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan, sedangkan *Price Earning Ratio* (PER) lebih menuju pada perbandingan antara harga saham perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh para pemegang saham. Semakin besar PBV yang ada pada perusahaan, maka semakin besar pasar percaya pada prospek perusahaan.

Selain mekanisme *good corporate governance* dan nilai perusahaan, perusahaan harus mempertimbangkan kinerja keuangan yang ada pada perusahaan. Kinerja keuangan yang baik pada perusahaan tidak hanya dapat diukur dengan *good corporate governance* saja tetapi juga dapat diukur dengan rasio keuangan yang ada pada perusahaan. Rasio keuangan merupakan alat ukur untuk menilai kinerja suatu

perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Pos-pos laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba/rugi, laporan aliran kas. Analisis rasio dapat digunakan oleh investor dan kreditor untuk membuat keputusan tentang pencapaian hasil perusahaan.

Baik atau buruknya kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas yaitu dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA). ROA dapat mengukur profitabilitas perusahaan secara menyeluruh. Dengan adanya ROA kita dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam tingkat pengembalian laba yang diperoleh dari aset perusahaan. Sehingga semakin tinggi nilai ROA pada perusahaan, semakin baik pula kinerja keuangan yang ada pada perusahaan tersebut. Seiring dengan meningkatnya kinerja keuangan maka nilai yang ada pada perusahaan juga akan meningkat.

Meningkatnya nilai perusahaan merupakan sebuah pencapaian hasil kerja keuangan perusahaan yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya karena dengan meningkatnya nilai perusahaan maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat (Julianti, 2015). Penerapan mekanisme *good corporate governance* dalam perusahaan dilakukan agar dapat menghasilkan kinerja keuangan yang tinggi yang akan menjadi daya tarik bagi investor sehingga dapat mempengaruhi naiknya nilai suatu perusahaan yang ada. Adanya penggunaan kinerja keuangan sebagai variabel *intervening* dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian tentang mekanisme *Good Corporate Governance* menjadi penting untuk diteliti khususnya di sektor pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sektor pertanian di Indonesia meliputi sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan *agriculture* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2017. Alasan peneliti menggunakan sampel pada perusahaan *agriculture*, karena perusahaan *agriculture* memanfaatkan sumber daya hayati yang

diolah untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan ini dapat menghabiskan sumber daya alam yang ada, sehingga diperlukan tata kelola yang baik agar perusahaan dapat mentaati prinsip-prinsip yang berlaku. Salah satu prinsipnya adalah prinsip pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban terhadap lingkungan dengan cara membudidayakan sumber daya alam yang ada.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah mekanisme *good corporate governance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah mekanisme *good corporate governance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel *intervening*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini yaitu, untuk menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel *intervening*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat akademik yaitu memberikan wawasan tentang mekanisme *Good Corporate Governance* dalam nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel *intervening*.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat praktik yaitu memberikan pengetahuan tentang keterkaitan antara variabel yang diteliti sehingga investor dapat memilih perusahaan – perusahaan yang

akan menjadi tempat untuk berinvestasi dengan memperhatikan *good corporate governance* yang terdapat di dalam perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan terdiri dari lima bab, sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 terdiri dari latar belakang masalah; perumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 terdiri dari landasan teori; penelitian terdahulu; pengembangan hipotesis; model penelitian/rerangka konseptual.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab 3 terdiri dari desain penelitian; identifikasi, definisi operasional, dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik penyempelan; analisis data.

BAB 4 ANALISIS dan PEMBAHASAN

Bab 4 terdiri dari gambaran umum objek penelitian; deskripsi data; hasil dan analisis; pembahasan.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, dan SARAN

Bab 5 berisi tentang simpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan data, keterbatasan penelitian, dan saran bagi peneliti selanjutnya.